

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah ekonomi secara garis besar mengacu pada kegiatan dan keadaan ekonomi suatu masyarakat pada waktu itu. Sementara sejarah sosial lebih berfokus pada masalah dan interaksi dari pelaku, yaitu orang yang melakukan atau menggerakkan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sejarah sosial ekonomi sangat penting untuk dikaji secara bersamaan karena tindakan ekonomi muncul sebagai hasil dari interaksi dari pelaku tersebut.

Berkebun adalah cara untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masyarakat pedesaan. Dalam situasi ini, perkebunan telah menjadi komponen pembangunan kesejahteraan negara. Pada masa lalu, orang dari negara lain datang ke perkebunan Indonesia untuk menanam tanaman rempah-rempah seperti cengkeh. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa selama sejarah perkebunan Indonesia, di mana Indonesia memiliki perkebunan yang dapat meningkatkan perekonomian negara, banyak diminati untuk mengambil keuntungan dari hasil perkebunan, seperti halnya tanaman cengkeh.

Di Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, perkebunan cengkeh memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, seperti halnya di wilayah lainnya. Perkebunan cengkeh berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk industri rokok kretek, meningkatkan pendapatan petani, dan memperbesar devisa negara. Selain itu, cengkeh juga memberikan peluang kerja dalam industri farmasi, perdagangan, serta sektor informal.

Selain cengkeh, lahan perkebunan di Desa Tolokibit juga digunakan untuk menanam tanaman pangan seperti singkong, cabai merah, dan pisang, yang berfungsi sebagai tanaman sampingan sambil menunggu panen cengkeh. Masyarakat pedesaan cenderung lebih familiar dengan istilah "perkebunan" daripada "ladang," karena kebiasaan lokal dalam menyebutkan kegiatan bertani mereka. Sejak abad ke-19, tanaman cengkeh tumbuh bersama tanaman lainnya seperti ubi, pisang, cabai, dan kelapa. Oleh karena itu, dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat Desa Tolokibit, baik berkebun maupun berladang dipahami sebagai kegiatan menanam.

Perkebunan cengkeh telah menyebar ke berbagai pulau di Indonesia, bahkan hingga ke daerah terpencil. Sistem perkebunan ini dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan penerapan sistem *cultuurstelsel* pada tahun 1830, yang kemudian diikuti oleh sistem *Agrarisch* pada tahun 1870. Perkebunan menjadi bagian dari ekonomi pertanian tradisional, di mana usaha kebun seringkali berfokus pada pertanian pangan.

Di kalangan masyarakat miskin, perkebunan dikelola oleh kelompok keluarga yang saling bekerja sama dalam menanam dan merawat tanaman. Sistem gotong royong ini telah menjadi tradisi yang berlangsung lama di pedesaan. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan peningkatan taraf hidup beberapa keluarga, ada

kecenderungan di mana kelompok elit lokal, yang kini memiliki penghasilan lebih tinggi, enggan terlibat dalam kegiatan gotong royong tersebut, meskipun mereka masih terkait secara keluarga.

Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Desa Tolokibit masih mempertahankan budaya kerja sama ini. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di pedesaan, mencerminkan dinamika kehidupan yang berkembang. Sejarah kolonial, dengan eksploitasi rempah-rempah oleh bangsa Barat, telah membentuk kebijakan ekonomi Indonesia, terutama dalam bidang perkebunan. Pengalaman sejarah ini memberikan pelajaran bagi Indonesia dalam mengelola pemerintahan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Tolokibit, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah.

Desa Tolokibit, yang terletak jauh dari ibu kota kabupaten dan dikelilingi laut, memiliki mata pencaharian utama berupa melaut dan berkebun. Tanah perkebunannya subur, terutama di daerah pegunungan dengan tanah merah, yang mendukung penanaman cengkeh. Meskipun akses ke perkebunan yang terletak di daerah berbukit terkadang sulit, masyarakat setempat sudah terbiasa dengan tantangan ini dan menjadikannya bagian dari kehidupan mereka.

Perkebunan cengkeh di Desa Tolokibit telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian keluarga, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan berkontribusi pada pendidikan. Selain itu, perkebunan juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan. Pembangunan pedesaan melalui perkebunan dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk kemakmuran, sementara yang lain memandangnya sebagai modernisasi yang belum sepenuhnya menyentuh aspek pembangunan.

Pembangunan desa melalui perkebunan menjadi tolak ukur bagi kesejahteraan masyarakat Desa Tolokibit. Perubahan dalam desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, sejalan dengan program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi berbasis perkebunan yang berkelanjutan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari bencana alam.

Perkebunan cengkeh di Desa Tolokibit juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sejalan dengan prinsip ekonomi yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup. Dinamika perubahan sosial yang terjadi di desa, baik sebagai kemajuan atau kemunduran, terkait erat dengan proses pembangunan yang sedang berlangsung. Sebagai teori perubahan sosial, perubahan tersebut dapat membawa masyarakat pada kemajuan atau sebaliknya, tergantung pada bagaimana pembangunan dilakukan.

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tampak di berbagai tempat, dan dapat dirasakan sebagai kenyataan melalui gejala seperti depersonalisasi, frustrasi, apatisme, dan perbedaan pendapat. Fenomena ini terjadi dalam berbagai bentuk dalam masyarakat, baik yang tradisional maupun modern. Pada masyarakat modern, perubahan cenderung terjadi dengan cepat, sementara di masyarakat tradisional, perubahan berlangsung lebih lambat (Simandjuntak, 2007:1). Perubahan sosial

dapat dipahami sebagai perbedaan keadaan yang terlihat antara waktu sebelum dan sesudah suatu periode tertentu.

Konsep perubahan sosial mencakup tiga aspek utama: perbedaan keadaan pada waktu yang berbeda, serta perubahan yang terjadi di dalam sistem sosial yang sama. Menurut Hawley (dalam Sztompka, 2010), perubahan sosial bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, bergantung pada aspek, fragmen, atau dimensi sistem sosial yang dilihat. Perubahan sosial muncul karena keadaan sosial yang kompleks, bukan hanya bersifat satu dimensi, melainkan dari gabungan berbagai elemen, seperti:

- 1) Unsur utama, yang berkaitan dengan jumlah dan jenis individu serta tindakan mereka.
- 2) Hubungan antar unsur, seperti ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, dan integrasi antar individu.
- 3) Fungsi unsur-unsur dalam sistem, misalnya peran pekerjaan individu atau kebutuhan untuk menjaga ketertiban sosial.
- 4) Pemeliharaan batas, yang mencakup kriteria untuk menentukan anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, serta prinsip rekrutmen dalam organisasi.
- 5) Sub sistem, seperti jumlah dan jenis bagian atau segmen dalam sistem yang dapat dibedakan.
- 6) Lingkungan, yang mencakup kondisi alam atau lokasi geopolitik.

Suharto (2005) mendefinisikan masyarakat nelayan sebagai kelompok individu yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka di laut. Masalah yang dihadapi masyarakat nelayan memiliki banyak aspek, sehingga solusi yang menyeluruh diperlukan daripada solusi parsial. Akibatnya, akar masalah yang menyebabkan kemiskinan nelayan harus dipahami.

Terdapat sejumlah hal yang menyebabkan kemiskinan nelayan atau masyarakat pesisir. Di antaranya, kurangnya perhatian pemerintah. Kalau pun ada program dari pemerintah yang hanya melihat masyarakat nelayan sebagai objek daripada subjek. Musim yang tidak menentu terkadang menghalangi nelayan untuk melaut selama beberapa pekan, di sisi lain kondisi alam sangat memengaruhi kesehatan nelayan. Cara nelayan menangkap ikan dipengaruhi oleh peralatan dan sumber daya manusia mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang teknologi menyebabkan kualitas dan kuantitas tangkapan ikan tidak meningkat.

Kebiasaan dan gaya hidup adalah faktor lain yang memperburuk kesejahteraan nelayan. Karena daur hidup nelayan menunjukkan kerja keras, sehingga tak masuk akal untuk mengatakan nelayan pemalas. Karena mengadopsi pola hidup kota yang konsumtif, akhirnya tak menabung untuk menghadapi paceklik, semata digunakan untuk membeli kebutuhan dasar. Sehingga mereka pun berutang, apakah itu rentenir ketika paceklik tiba.

Masyarakat Banggai Laut selalu bergerak, berkembang, dan berubah, apalagi karena Banggai adalah wilayah maritim yang terbuka yang mampu mengalami perubahan sosial dan budaya.

1.2. Tinjauan Pustaka

1.2.1. Dinamika Status Sosial

Dalam kebudayaan, pada dasarnya manusia berinteraksi dalam setiap transaksi sosial, meskipun seringkali tidak berjalan sesuai rencana, namun mereka tetap terorganisir. Manusia memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu dengan tepat, karena mereka memiliki pemahaman bersama tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam konteks sosial tertentu. Pemahaman ini kemudian dijadikan pedoman dalam adat dan hukum, yang dikenal sebagai norma atau hukum konvensional, dan kumpulan norma-norma ini membentuk struktur sosial—pola tindakan yang sudah mapan (Salim, 2006).

Secara umum, ada tiga kriteria dasar dalam menganalisis stratifikasi masyarakat, yaitu privilese, kekuasaan, dan prestise (Lanski, 1966; Weber, 1968; Lawang, 2004). Dimensi pertama adalah privilese, yang membedakan individu berdasarkan kemampuan mereka mengumpulkan sumber daya ekonomi. Dimensi kedua adalah kekuasaan, yang merujuk pada kemampuan untuk mencapai tujuan, bahkan jika itu bertentangan dengan keadaan yang ada. Kekuasaan seringkali terkait erat dengan kekayaan dan kesuksesan ekonomi, yang memberi peluang untuk memperoleh kekuasaan, terutama di masyarakat barat. Namun, kekayaan dan kekuasaan tidak selalu berjalan beriringan. Di beberapa negara, kekuasaan dapat didasarkan pada faktor lain, seperti pengetahuan khusus atau kemampuan berbicara di depan umum, sehingga perbedaan antara yang kaya dan yang tidak bisa jadi tidak begitu signifikan. Dimensi ketiga adalah prestise, yang mengacu pada penghargaan, perhatian, atau kebanggaan sosial yang diberikan kepada individu. Penilaian sosial ini diakui berdasarkan norma dan nilai yang berlaku dalam kelompok tertentu.

Weber (1968) menjelaskan bahwa hubungan antara privilese, kekuasaan, dan prestise saling terkait. Dalam konteks ini, privilese ekonomi memiliki pengaruh terbesar. Namun, ketiga dimensi tersebut harus dianalisis secara terpisah. Sosiolog Mills (1956) setuju dengan pandangan Weber, dan menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga dimensi ini di kalangan elit menghasilkan suatu kelompok penguasa yang terintegrasi dan mengembangkan gaya hidup dengan penekanan pada prestise tinggi serta menduduki posisi penting dalam bidang ekonomi. Mobilitas horizontal yang terjadi di antara berbagai bidang sosial, politik, dan ekonomi juga terjadi di kalangan elit, menjadikan mereka kelompok yang terpisah dan menonjol dibandingkan dengan kalangan bawah.

G.E. Lenski berbeda pandangan dengan Max Weber dan C.W. Mills mengenai hubungan antar dimensi dalam stratifikasi sosial. Lenski menyatakan bahwa untuk memahami distribusi privilese dalam suatu masyarakat, kita harus terlebih dahulu memahami distribusi kekuasaan. Setelah itu, kita bisa mengetahui pola distribusi privilese yang terkait. Dalam pandangannya, privilese mempengaruhi kekuasaan melalui prestise, tetapi tidak ada pengaruh langsung dari privilese terhadap kekuasaan.

Perubahan sosial akan memengaruhi distribusi ketiga dimensi stratifikasi sosial, dan ini sesuai dengan pandangan Schultz yang menyatakan bahwa realitas sosial

didefinisikan melalui interaksi sosial berdasarkan pengetahuan bersama. Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial dibentuk melalui interaksi sosial dan internalisasi struktur pengetahuan. Blumer menambahkan bahwa tindakan sosial antar kelompok terjadi melalui komunikasi dan interpretasi makna, baik melalui kata-kata maupun isyarat.

Masyarakat nelayan memiliki karakteristik sosial yang unik dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan alam, pola ekonomi berbasis kelautan, serta sistem sosial yang telah berkembang turun-temurun. Berbagai aspek seperti modal sosial, kepercayaan, dan struktur sosial dalam masyarakat nelayan menentukan bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial dalam masyarakat nelayan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Salah satu aspek penting dalam dinamika sosial masyarakat nelayan adalah modal sosial yang berbasis pada jaringan sosial dan kepercayaan. Fukuyama (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai norma dan jaringan yang memungkinkan terjadinya kerja sama dalam suatu kelompok atau komunitas. Dalam masyarakat nelayan, modal sosial berperan dalam pembagian hasil tangkapan, gotong royong dalam perbaikan perahu, serta dalam sistem sosial berbasis patron-klien yang melibatkan nelayan kecil dengan pemilik modal atau pemodal.

Kepercayaan di antara nelayan juga merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam sistem bagi hasil, nelayan sering kali bekerja sama dengan pemilik kapal berdasarkan kepercayaan tanpa kontrak tertulis (Platteau, 2000). Sistem ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat nelayan sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, mereka tetap mampu membangun jaringan kerja sama berbasis saling percaya.

Masyarakat nelayan tidak bersifat homogen, tetapi memiliki struktur sosial yang kompleks. Stratifikasi ekonomi dalam masyarakat ini sering kali terlihat dalam perbedaan antara pemilik kapal, nelayan buruh, dan pekerja pengolahan hasil laut. Pemilik kapal atau pemodal memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, sedangkan nelayan buruh bergantung pada hasil tangkapan dan sering kali mengalami ketidakpastian pendapatan (Satria, 2009).

Selain itu, dalam beberapa komunitas nelayan, terdapat sistem kekerabatan yang kuat yang memengaruhi distribusi sumber daya dan peluang ekonomi. Dalam sistem ini, hubungan patronase antara pemilik kapal dan nelayan buruh sering kali menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi. Namun, di sisi lain, hubungan ini juga dapat memberikan jaminan sosial bagi nelayan buruh, terutama dalam situasi sulit seperti musim paceklik atau cuaca buruk.

Dinamika sosial masyarakat nelayan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi. Perubahan iklim, eksploitasi sumber daya laut, serta kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perikanan berpengaruh besar terhadap mata pencaharian mereka. Menurut Allison dan Ellis (2001), masyarakat nelayan sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap perubahan lingkungan karena ketergantungan mereka pada sumber daya alam yang tidak selalu stabil.

Selain itu, inovasi teknologi dalam perikanan juga memengaruhi pola kerja dan struktur sosial dalam komunitas nelayan. Penggunaan alat tangkap modern seperti jaring pukat dan perahu bermesin besar telah meningkatkan produktivitas tangkapan, tetapi di sisi lain juga memperdalam kesenjangan sosial antara nelayan tradisional dan pemilik modal besar (Bailey, 1997). Dalam beberapa kasus, nelayan tradisional yang tidak mampu bersaing dengan teknologi baru terpaksa mencari mata pencaharian alternatif atau bermigrasi ke daerah lain.

Dinamika sosial dalam masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh modal sosial, kepercayaan, struktur sosial, serta faktor lingkungan dan teknologi. Keberlanjutan sistem sosial mereka bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil serta penguatan modal sosial dalam komunitas mereka sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan sosial-ekonomi mereka di masa depan.

1.2.2. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan ciri khas masyarakat dan kebudayaan, baik itu masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Dalam masyarakat modern perubahan itu sangat cepat, sedang dalam masyarakat tradisional sangat lambat (Simandjuntak, 2007:1). Berbicara tentang perubahan sosial, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu. Konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan (1) perbedaan (2) pada waktu yang berbeda (3) di antara keadaan sistem sosial yang sama.

Contoh perubahan sosial yang dikemukakan oleh Hawley (dalam Sztompka, 2010) Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pengamatan, apakah dari sudut aspek, fragmen atau dimensi sistem sosialnya. Ini disebabkan keadaan sosial itu tidak sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul dari kombinasi atau gabungan keadaan berbagai komponen seperti berikut :

- a) Unsur-unsur pokok (misalnya, jumlah dan jenis individu, serta tindakan mereka).
- b) Hubungan antar unsur (misalnya, ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, hubungan antar individu, integrasi).
- c) Berfungsinya unsur-unsur di dalam sistem (misalnya : peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial).
- d) Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota sistem, syarat untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi dan sebagainya).
- e) Sub sistem (misalnya : jumlah dan jenis bagian, segmen atau divisi khusus yang dapat dibedakan).

f) Lingkungan (misalnya : keadaan alam, atau lokasi geopolitik).

Masyarakat selalu bergerak, berkembang, dan berubah. Dinamika masyarakat ini terjadi bisa karena faktor internal yang melekat dalam diri masyarakat itu sendiri, dan bisa juga karena faktor lingkungan eksternal. Narwoko mengatakan bahwa ada banyak perspektif teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial, misalnya perspektif teori sosiohistoris, struktural fungsional, struktural konflik, dan psikologi sosial (Narwoko 2004, 365).

Teori sosiohistoris menempatkan variabel latar belakang sejarah dengan menekankan proses evolusi sebagai faktor utama dalam proses terjadinya perubahan sosial. Perspektif ini melihat perubahan sosial dalam dua dimensi yang saling berbeda asumsi yakni perubahan sebagai suatu siklus dan perubahan sebagai suatu perkembangan.

Sebagai siklus sulit diketahui ujung pangkal terjadinya perubahan sosial. Perubahan terjadi lebih merupakan peristiwa prosedural dengan memandang sejarah sebagai serentetan lingkaran yang tak berujung. Sedangkan perubahan sebagai suatu perkembangan juga bahwa pada dasarnya masyarakat walau secara lambat namun pasti akan selalu bergerak, berkembang dan akhirnya berubah dari struktur sosial sederhana menuju ke arah yang lebih modern. Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan/struktur didalam masyarakat, yang meliputi pola pikir, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Berikut pandangan para ahli tentang perubahan sosial antara lain:

1. Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh perubahan sosial yang dimaksud adalah terjadinya pengorganisasian buruh dalam masyarakat industri atau kapitalistis. Hal ini menyebabkan perubahan hubungan antara majikan dan para buruh yang kemudian terjadi perubahan juga dalam organisasi politik yang ada dalam perusahaan tersebut dan masyarakat.
2. Mac Iver, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan dalam interaksi sosial (*social relation*) atau perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.
3. Selo Soemartjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
4. William Ogburn, menjelaskan pengertian perubahan sosial dengan membuat batasan ruang lingkup perubahan tersebut. Ogburn menjelaskan bahwa perubahan sosial itu mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dengan penekanan yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang materiil terhadap unsur-unsur kebudayaan yang immateriil. Belajar dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian perubahan sosial, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perubahan sosial yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat mengalami kemajuan, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran. Maka dari itu perubahan sosial yang dibahas di sini

adalah perubahan sosial berdasarkan penyebabnya yakni perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Contoh perubahan sosial yang direncanakan seperti adanya rencana pemerintah dalam program pembangunan masyarakat melalui sistem KB (Keluarga Berencana). Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan seperti peristiwa peperangan, bencana alam dan lain sebagainya. Menurut pendapat Weber bahwa tindakan sosial atau aksi sosial tidak bisa dipisahkan dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan

5. dicapai oleh pelaku (Max Weber *dalam* Berger 2004). Tindakan sosial dilihat dari segi motifnya terdapat empat tindakan yakni, (1) tindakan untuk mencapai satu tujuan tertentu, (2) tindakan berdasar atas adanya satu nilai tertentu, (3) tindakan emosional, (4) tindakan yang didasarkan atas adat istiadat tertentu (tradisi).

Ilmu sosiologi banyak dipengaruhi oleh berbagai ilmu pengetahuan lainnya seperti biologi, geologi, dan masih banyak lagi. Dengan demikian tidak heran jika beberapa teori perubahan sosial yang akan dijelaskan menyebutkan beberapa pemikiran yang bukan orang sosiologi bahkan orang yang bukan dari latar belakang ilmu pengetahuan sosial. Maka dengan ini perubahan sosial terjadi karena ada faktor dari dalam maupun dari luar. Adapun faktor dari dalam yang menyebabkan perubahan sosial seperti keadaan ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, agama dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar yang menyebabkan perubahan sosial seperti bencana alam, perang, gunung meletus, tsunami dan sebagainya.

Konsep perubahan sosial yang mau diangkat dalam tulisan ini adalah soal perubahan sosial ekonomi dan perubahan sosial budaya.

Karl Max dalam konsep *economic structure* berpendapat bahwa penggerak perubahan yang akan memimpin perubahan adalah termasuk proses perubahan sosial dan lingkungan ekonomi menjadi dasar segala perilaku masyarakat. Marx dalam Salim berpendapat bahwa “siapa yang menguasai ekonomi, akan juga menguasai aspek lainnya” (Salim, 2014;30). Hal ini berarti ekonomi menjadi dasar dari perubahan sosial. Pendapat yang sama ditulis oleh Damsar ketika ekonomi dalam hal ini adalah materi masyarakat berkembang dengan baik, maka akan mempengaruhi perilaku sosial atau sosio budaya masyarakat, seperti cara berpikir, bertindak, gaya hidup, pertemanan atau ideologi (Damsar, 2015;70).

Khosman mengatakan bahwa ekonomi masyarakat menunjukkan ekonomi yang sangat rendah atau dikategorikan miskin (Khosman, 2015:3). Miskin menurut Chambers dan Nasikun (Nasikun, 2001;3) tergolong dalam 4 bentuk, yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut, bila pendapatan berada di bawah garis kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau semua masyarakat.
- 3) Kemiskinan kultural, persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, misalnya malas, pemboros, tidak kreatif.

4) Kemiskinan struktural, situasi miskin karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial dan kerap menyuburkan kemiskinan.

Dari keempat kategori yang sudah dijelaskan di atas menggambarkan situasi masyarakat dalam kemiskinan. Kemiskinan yang paling utama adalah kemiskinan absolut. Kebutuhan dasar ini sangat mempengaruhi budaya masyarakat. Budaya mereka tidak bisa berkembang karena situasi dan kondisi mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Perubahan ekonomi dan perubahan budaya dapat berkembang atau berubah tentu saja banyak mengalami konflik dalam struktur masyarakat. Maka, pendekatan konflik lebih cocok untuk melihat suatu perubahan dalam segi ekonomi dan budaya. Pendekatan konflik ini dilihat dari teori pendekatan konflik klasik dan teori pendekatan modern.

Arisandi menulis teori konflik berdasarkan teori pendekatan konflik klasik berdasarkan pemikiran Karl Marx (Arisandi 2015a;48). Marx dalam teori perubahan sosialnya sering digolongkan ke dalam pendekatan konflik karena menekankan aspek struktur atau klasifikasi dalam perubahan ekonomi. Hal ini yang mendorong Karl Marx menggolongkan masyarakat ke dalam dua golongan atau kelas, yakni golongan utama yaitu kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja (proletar). Kedua kelas ini senantiasa berada dalam posisi berhadapan sesuai dengan kepentingan ekonominya masing-masing. Kepentingan ekonomi kelompok pemilik modal (borjuis) yaitu pengusaha, pemilik tanah, pemilik bangunan dan lain sebagainya, yang tentu saja memiliki tujuan atau orientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga pengusaha akan berusaha bagaimanapun caranya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Menurut pengusaha, keuntungan (profit) didapat dengan menekan kaum proletar atau pekerja untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya dan biaya kerja atau upah kerja yang diberikan kepada kaum proletar ini sangat kecil atau kecil.

Sementara pihak pekerja (proletar) menekankan kepentingan ekonominya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai imbalan dari tenaga dan waktu yang telah diberikan dalam proses menghasilkan produksi. Dengan demikian terjadilah pertentangan atau konflik yang berkepanjangan dan dari konflik itu yang selalu menjadi korban adalah kelompok proletar karena tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan tidak mendapat hak atas tanah, bangunan dan hidup yang layak.

Teori pendekatan konflik modern yang diuraikan di sini adalah teori konflik menurut Ralf Dahrendorf, sekitar tahun 1960. Arisandi menguraikan pendapat Dahrendorf mengenai proses konflik sosial yang mendorong terjadinya perubahan sosial, adalah pada setiap masyarakat, terdapat dua kelompok yang masing-masing menampilkan peran positif dan peran negatif (Arisandi, 2015b;175). Kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan keadaan yang sekarang disebut *status quo*, dianggap menampilkan peranan positif, sedangkan kelompok yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat secara progresif, dianggap menampilkan peranan negatif.

Kedua kelompok ini mendapatkan peranan yaitu demi kepentingannya masing-masing yang saling bertentangan. Kelompok yang satu tetap pada keadaan yang sekarang, sedangkan kelompok yang lain ingin maju dan berubah. Konflik yang terus menerus terjadi di antara kedua kelompok ini akan membawa masyarakat ke dalam perubahan sosial. Cepat atau lambat, besar atau kecil ukuran atau skala perubahan sosial yang terjadi, tergantung pada faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Dengan demikian kelompok yang menang atau berhasil dalam konflik menurut teori ini adalah kelompok yang mendapat otoritas atau kewenangan untuk menguasai atau menekan orang lain sehingga stabilitas masyarakat dapat berjalan. Otoritas menurut pandangan Dahrendorf bukan terletak pada individu, melainkan terletak pada posisi, sehingga tidak bersifat statis. Orang yang berkuasa pada lingkungan tertentu belum tentu memiliki kuasa di lingkungan lain.

Perubahan sosial dapat terjadi dalam teori ini melalui konsensus. Konsensus adalah pendapat atau gagasan yang kemudian diadopsi oleh sebuah kelompok kepada kelompok yang lebih besar karena berdasarkan kepentingan (seringkali dengan melalui sebuah fasilitasi) hingga dapat mencapai pada tingkat keputusan yang dikembangkan. Konsensus yang dimaksudkan di sini adalah secara tidak langsung, masyarakat akan tunduk pada proses perubahan yang kebijakannya ditetapkan otoritas saat itu. Masyarakat akan tumbuh dan tunduk di dalam sistem sosial yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang atau yang berkuasa. Manfaat otoritas yang dibuat oleh otoritas belum tentu diperuntukkan bagi masyarakat yang miskin, sehingga akibat dari kebijakan itu malah membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin.

Problem yang muncul dari perubahan ekonomi dan sosio budaya ini adalah siapa yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini? Masyarakat membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal (kebutuhan pokok) dan pemberdayaan sumber daya manusia. Abraham Maslow menuliskan tingkat kebutuhan manusia, kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisiologis. Agar tetap hidup, manusia membutuhkan makan setiap hari, pakaian yang layak dan memiliki tempat tinggal yang pantas. Soetomo menulis bahwa semua warga masyarakat tentu mempunyai cita-cita yang sama yaitu hidup sejahtera (Soetomo, 2016;340). Hidup sejahtera yang dimaksud adalah sejahtera secara jasmani dan spiritual termasuk dari segi ekonomi. Masyarakat tidak takut menghadapi hari esok, masyarakat merasa nyaman dan tenteram menjalani hidup ini, kebutuhan dasar terpenuhi sehingga perubahan sosial dalam bidang lain akan terpenuhi juga.

Jika ekonomi belum terpenuhi, maka hal ini juga menyebabkan sumber daya manusia yang meliputi; cara berpikir, bertindak, bertutur kata atau gaya hidup, budaya, cara bersosialisasi sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang hidup layak dari segi ekonomi. Sumber daya menjadi problem, karena jalan keluar yang ditawarkan oleh pihak lain, belum tentu diterima oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan gaya hidup lama.

Menurut Weber problem ekonomi dan sumber daya manusia ini bisa dipecahkan dengan menggunakan sistem otoritas legal atau kepemimpinan legal.

Ritzer berpendapat bahwa kekuasaan atau kepemimpinan adalah probabilitas (peluang bahwa sesuatu akan terjadi) suatu perintah tertentu yang akan dipenuhi oleh sekelompok orang (Ritzer, 2008;140). Pemikiran Marx Weber hampir sama dengan pemikiran Dahrendorf tetapi Weber lebih melihat otoritas kepemimpinan, lebih dalam pengertian kemampuan untuk mempengaruhi tindakan dan pikiran.

Weber berpendapat bahwa kepemimpinan otoritas legal merupakan kepemimpinan yang didasarkan pada aturan tertulis atau ada sistem yang jelas dan baku, yang dalam hal ini disebut birokrasi. Sistem kepemimpinana birokrasi ini bisa sangat memaksa dan terstruktur dengan baik sehingga sangat kuat, rasional, serta paling dapat diandalkan untuk menjaga sebuah otoritas berjalan dengan baik.

1.2.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sosial

Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat terjadi karena masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Perubahan juga dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar sehingga masyarakat secara sadar ataupun tidak akan mengikuti perubahan. Perubahan berasal dari dua sumber yaitu faktor acak dan faktor sistematis. Faktor acak meliputi iklim, cuaca, atau karena adanya kelompok-kelompok tertentu. Faktor sistematis adalah faktor perubahan sosial yang disengaja dibuat. Keberhasilan faktor sistematis ditentukan oleh pemerintahan yang stabil dan fleksibel, sumber daya yang cukup, dan organisasi sosial yang beragam. Jadi, perubahan sosial biasanya merupakan kombinasi dari faktor sistematis dengan beberapa faktor acak.

Menurut Soerjono Soekanto, adanya faktor-faktor intern (dari dalam masyarakat) dan ekstern (dari luar masyarakat) yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor intern meliputi perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan (revolusi) dalam tubuh masyarakat. Sedangkan faktor ekstern meliputi faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Faktor pendorong perubahan sosial adalah faktor yang mempercepat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kontak dengan masyarakat lain, difusi (penyebaran unsur-unsur kebudayaan) dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, sistem stratifikasi (lapisan) sosial terbuka, penduduk yang heterogen (bermacam macam), ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, orientasi ke masa depan, nilai yang menyatakan bahwa manusia harus berusaha memperbaiki nasibnya, disorganisasi (pertikaian) dalam keluarga, dan sikap mudah menerima hal-hal baru.

Perubahan sosial tidak akan selalu berjalan mulus. Perubahan sosial seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat sekali, rasa takut akan terjadinya disintegrasi (meninggalkan tradisi), sikap yang tertutup, hambatan yang bersifat ideologis, dan hakikat hidup.

Perubahan sosial di masyarakat nelayan tidak dapat dihindari dan terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, mulai dari ekonomi, teknologi, lingkungan, kebijakan pemerintah, hingga perubahan budaya. Meskipun perubahan ini dapat membawa manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, di sisi lain juga dapat memunculkan tantangan baru seperti kesenjangan sosial, konflik, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berimbang dalam menghadapi perubahan ini, termasuk kebijakan yang berpihak kepada nelayan kecil, pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan, serta upaya pelestarian budaya lokal agar nilai-nilai tradisional tidak hilang seiring dengan modernisasi.

Masyarakat nelayan merupakan kelompok sosial yang sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat nelayan mengalami berbagai perubahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Perubahan sosial ini dapat berupa transformasi dalam struktur ekonomi, pola kerja, sistem kepercayaan, hingga hubungan sosial antaranggota masyarakat. Artikel ini akan mengulas berbagai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat nelayan, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, teknologi, maupun kebijakan pemerintah.

Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Sosial

1) *Perubahan Ekonomi dan Globalisasi*

Perkembangan ekonomi global telah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat nelayan. Permintaan pasar yang semakin luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, menyebabkan perubahan dalam pola produksi perikanan. Sebagai contoh, nelayan yang sebelumnya menangkap ikan dengan metode tradisional kini mulai menggunakan alat tangkap modern untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka (Bailey & Jentoft, 1990). Selain itu, masuknya investasi asing dalam sektor perikanan dapat mengubah struktur kepemilikan dan distribusi hasil laut di masyarakat nelayan.

2) *Kemajuan Teknologi Perikanan*

Penggunaan teknologi dalam dunia perikanan, seperti kapal bermotor, jaring modern, dan alat navigasi canggih, telah mengubah cara nelayan bekerja. Teknologi memungkinkan mereka untuk menangkap ikan dalam jumlah lebih besar dan menjangkau wilayah tangkap yang lebih luas (Salagrama, 2006). Namun, penggunaan teknologi juga berpotensi menyebabkan kesenjangan sosial antara nelayan tradisional yang masih menggunakan alat sederhana dengan nelayan modern yang memiliki akses ke teknologi mutakhir.

3) *Degradasi Lingkungan dan Perubahan Iklim*

Faktor ekologis seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya laut berpengaruh besar terhadap kehidupan nelayan. Pemanasan global menyebabkan naiknya suhu air laut, perubahan pola migrasi ikan, serta peningkatan frekuensi badai yang mengancam keselamatan nelayan (FAO, 2018). Selain itu, pencemaran laut akibat limbah industri dan aktivitas manusia juga berdampak pada menurunnya jumlah ikan yang tersedia, sehingga mempersulit kehidupan masyarakat nelayan.

4) *Kebijakan Pemerintah dan Regulasi Perikanan*

Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya perikanan dapat mempengaruhi kehidupan nelayan. Misalnya, pemberlakuan kuota tangkapan, zona konservasi, dan larangan penggunaan alat tangkap tertentu dapat mengubah strategi bertahan hidup nelayan (Berkes et al., 2001). Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, dalam praktiknya sering kali menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat nelayan yang merasa dirugikan.

5) *Migrasi dan Perubahan Struktur Sosial*

Tekanan ekonomi dan perubahan lingkungan sering kali mendorong masyarakat nelayan untuk bermigrasi ke daerah lain dalam mencari mata pencaharian baru. Migrasi ini dapat mengubah struktur sosial dalam komunitas nelayan, baik dalam hal hubungan kekerabatan, sistem gotong royong, maupun pembagian kerja. Selain itu, masuknya pendatang baru dengan latar belakang budaya berbeda juga dapat memicu asimilasi atau bahkan konflik sosial di masyarakat nelayan (Gerritsen, 2010).

6) *Modernisasi dan Perubahan Nilai Budaya*

Arus modernisasi membawa perubahan dalam sistem nilai dan norma sosial di masyarakat nelayan. Jika sebelumnya solidaritas dan gotong royong menjadi nilai utama dalam kehidupan mereka, kini nilai-nilai individualisme dan kompetisi mulai berkembang. Hal ini sering kali dipengaruhi oleh akses terhadap media massa, pendidikan, dan interaksi dengan masyarakat luar yang lebih luas (Smith, 1996).

1.2.4. Masyarakat Pesisir

Masyarakat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang saling berinteraksi dalam suatu sistem adat dan terikat oleh identitas bersama, yang mencakup kebudayaan suatu kelompok atau bangsa (Koentjaraningrat, 1985). Masyarakat maritim terdiri dari kelompok yang saling berinteraksi, seperti nelayan dan pelayar, yang terbagi menjadi dua kategori sosial-ekonomi: (1) pedesaan tradisional yang berkembang, dan (2) perkotaan modern yang kapitalis.

Masyarakat maritim tipe pertama cenderung memiliki struktur sosial yang lebih egaliter, dengan hubungan yang akrab, santai, dan tolong-menolong, di mana perbedaan status seringkali tidak terlihat jelas. Sebaliknya, masyarakat maritim tipe kedua, seperti nelayan atau pelayar modern, memiliki struktur yang lebih formal dengan hierarki status dan aturan pengupahan yang berbeda berdasarkan peran individu.

Menurut Marvin Harris (1979), perubahan masyarakat dan kebudayaan dapat dianalisis melalui tiga struktur: infrastruktur, struktur sosial, dan superstruktur. Infrastruktur, yang terdiri dari teknologi, energi, dan faktor-faktor material lainnya, mempengaruhi struktur sosial. Struktur sosial ini kemudian berpengaruh pada superstruktur, yang mencakup nilai, ideologi, simbol, dan norma yang ada dalam

masyarakat. Harris mengembangkan konsep "materialisme budaya", yang menjelaskan perubahan sosial dan kebudayaan sebagai hasil dari perubahan infrastruktur yang mempengaruhi struktur dan superstruktur masyarakat.

Menurut Rappaport, tradisi suku Maring Tsembaga yang sering mengorbankan babi memiliki dampak penyesuaian ekologis yang tidak selalu disadari oleh masyarakat tersebut. Tradisi ini merupakan contoh kontrol budaya yang berperan penting dalam masyarakat Tsembaga. Ia menjelaskan bahwa pengorbanan babi memberikan manfaat besar bagi komunitas, karena daging babi yang disajikan dalam upacara ritual memberikan asupan protein berkualitas tinggi, yang sangat dibutuhkan terutama oleh prajurit sebelum berperang.

Namun, praktik pengorbanan babi ini juga mempengaruhi jumlah populasi babi yang meningkat, yang dapat menyebabkan ketegangan dan konflik antar kelompok di suku Maring. Pertempuran yang terjadi kadang berlangsung lama, bahkan sampai menghancurkan rumah, kebun, dan ternak babi. Setelah pertempuran, ritual dilakukan untuk meredakan ketegangan, di mana babi-babi dibunuh sebagai persembahan kepada leluhur, sementara sebagian dagingnya dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam konflik. Tabu yang berlaku selama permusuhan kemudian dilonggarkan, dan gencatan senjata resmi dilakukan melalui upacara penanaman rubin (belukas suci). Pesta babi, yang dikenal sebagai kaiko, dilakukan setelah rubin dicabut.

Untuk menyelenggarakan pesta babi ini, dibutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 5 hingga 10 tahun, agar populasi babi berkembang cukup banyak. Selama periode ini, wanita kawin bertanggung jawab memberi makan ternak babi yang terus berkembang, sementara laki-laki bertugas dalam peperangan. Konflik yang disebabkan oleh kerusakan kebun oleh babi juga semakin memperburuk situasi, sehingga dorongan untuk mengakhiri permusuhan dan melaksanakan ritual sering kali datang dari kaum wanita.

Rappaport berpendapat bahwa proses ritual ini memiliki dampak tak terduga yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memperkuat hubungan antara kelompok lokal. Ia melihat hubungan ini sebagai sebuah sistem sibernetik—sebuah sirkuit informasi yang saling berhubungan antara budaya suku Maring dan ekosistem tempat mereka tinggal. Sistem ini bekerja melalui umpan balik, di mana pengorbanan babi dan persaingan antar kelompok menjaga kestabilan lingkungan dan sosial.

Kontrol budaya yang diterapkan melalui pengorbanan babi dan konflik antar kelompok menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengatur jumlah populasi babi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan populasi manusia. Peningkatan jumlah babi memerlukan tenaga kerja lebih banyak untuk memberi makan ternak tersebut, yang pada gilirannya mempengaruhi struktur sosial. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat memperluas hubungan sosial antar individu dalam masyarakat, menciptakan jaringan sosial yang lebih kompleks.

1.2.5. Dinamika Sosial di Masyarakat Pesisir

Perspektif evolusioner menjelaskan perubahan masyarakat dari sederhana menjadi kompleks. Evolusionisme mengalami perkembangan dan *kemandegan*, bersifat linier maupun multilinier, atau dari klasik ke neo-evolusionisme (Sztompka, 2005; Johnson, 1986). Teori sosiologi modern tidak lagi mengandalkan perspektif ini di dalam pembahasannya (Ritzer dan Goodman, 2005; Ritzer dan Smart, 2001), tetapi digunakan oleh antropolog sosial masa lalu, seperti Malinowski, Redcliff-Brown, Sahlin, Service, dan Spencer, maupun antropolog sosial masa kini. Masyarakat nelayan di Indonesia secara umum berada pada perkembangan awal, yaitu pada tahapan *hunting and fishing* (Schutkowski, 2006; Sukadana, 1983; Koentjaraningrat, 1985). Dengan demikian, perspektif evolusioner masih relevan digunakan sebagai dasar memahami dinamika masyarakat yang terikat habitat.

Masyarakat berinteraksi intensif dengan lingkungan sosial luar, sehingga pendekatan sosiologi modern juga relevan digunakan. Kajian evolusioner dalam struktur sosial berusaha memahami perkembangan masyarakat, dan memadukan pendekatan ekosistem diharapkan lebih kontekstual. Studi sebelumnya (Susilo *et al*, 1991; Susilo dkk. 2003) memberikan dasar pada tiga periodisasi perubahan.

Masyarakat Karanggongso pada awalnya merupakan sebuah komunitas kecil, sebagaimana yang digambarkan oleh Redfield (1963). Perkembangan struktur masyarakat dapat ditelaah berdasarkan perkembangan organisasi sosial primitif sebagaimana yang dilakukan oleh Servis (1971) maupun pada unsur-unsur organisasi sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Firth (1971). Kajian terhadap struktur sosial memberikan makna bahwa struktur memiliki daya tampung yang dinamis, dapat berkembang sesuai dengan perjalanan sejarah sosial masyarakat bersangkutan. Interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat dari lingkungan sosial luar akan direspons sesuai dengan daya tampung atau kapasitas ruang struktur sosial. Jika elemen baru yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat dapat berintegrasi dengan struktur, atau struktur berada dalam kapasitas yang longgar untuk menerima elemen baru, maka elemen baru dapat diterima dan menjadi bagian struktur. Sebaliknya, elemen baru yang tidak mampu berintegrasi dengan struktur akan menguras kapasitas ruang struktur, yang akan menyebabkan daya tampung struktur sosial semakin sempit. Konsep *Adaptation* (adaptasi) – *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) – *Integration* (integrasi) – *Latent Pattern Maintenance* (pemeliharaan pola), yang sangat terkenal dan disingkat AGIL dari fungsionalisme struktural Parsons (1957) merupakan salah satu rujukan penjelasan ini, meskipun peran pendekatan ini mengalami pemudaran. Introduksi kelembagaan ekonomi di pedesaan pantai yang belum berfungsi secara efektif (Susilo, 1986; Qoid *et al*, 1993; Setiawan, *et.al.*, 1993) sampai dibentuknya kelembagaan akomodatif (Susilo *et al.*, 1996) dapat menjelaskan peningkatan kapasitas ruang struktur sosial. Introduksi kelembagaan ekonomi (KUD/TPI) belum berhasil berintegrasi dengan struktur masyarakat pedesaan pantai. Kelembagaan akomodatif mencari titik temu antara bagian tertentu kelembagaan yang memiliki akar sosial dalam masyarakat lokal dengan unsur baru yang dapat diintegrasikan dari lingkungan sosial luar untuk

meningkatkan kapasitas ruang struktur sosial. Dimensi lain struktur sosial adalah titik kritis (BSN, 1988; Susilo, *et al.*, 2006), yaitu batas kapasitas maksimum ruang struktur sosial.

Pendekatan evolusioner Spencerian, menyatakan masyarakat berevolusi melalui diferensiasi struktural dan fungsional: (1) dari sederhana menuju kompleks, (2) dari tanpa bentuk ke keterkaitan antarbagian, (3) dari keseragaman (homogenitas) ke spesialisasi (heterogenitas), dan (4) dari ketidakstabilan ke stabil. Kritik terhadap evolusi klasik menghasilkan neo-evolusi, dan bahkan ada gejala akan kembali ke evolusionisme biologis (Sztompka, 2005), di satu sisi, di sisi lain kritik Yahya (2004) terhadap evolusi biologis --- terutama pada Darwinisme, mendorong perlunya memisahkan antara evolusi biologi dengan evolusi sosial. Pendekatan organismik adalah alat analisis perubahan struktur masyarakat. Aliran neo-evolusioner Parson maupun Lenski, menyatakan bahwa evolusi sosial berlangsung di sepanjang proses utama diferensiasi dan integrasi, dan diferensiasi-diferensiasi struktural muncul disertai potensi untuk meningkatkan kemampuan adaptif sistem sosial (Parson, 1966; Lenski, 1984; Cubbon, 2003).

Pendekatan teoretik dilengkapi dengan konsep struktur sosial, yang menyatakan bahwa struktur merupakan suatu keberlanjutan susunan orang-orang dalam hubungan-hubungan yang dibatasi atau dikendalikan oleh institusi-institusi, yaitu norma-norma atau pola-pola tingkah laku yang dibangun masyarakat (Radcliff-Brown, 1968). Melalui berbagai studi lapang (Susilo, *et al.*, 1991; Susilo *et al.*, 1996-1998) dan pustaka (Abercrombie *et al.* 1988; Susilo, 2006, Keel, 2007), konsep struktur tersebut ditambah dengan beberapa konsep seperti: stratifikasi, status, peran, *social group* (kelompok), perilaku terduga, dan kekuasaan. Kajian struktur yang sebenarnya memberikan ilham untuk berfokus pada kapasitas ruang dan titik kritis diakui berasal dari Giddens (1993) tentang teori strukturasi. Namun berdasarkan kritik terhadap Giddens (Ross, 2003) yang menyatakan bahwa: Di Australia, Giddens lebih berpengaruh sebagai penganjur mazhab pemikiran yang relatif tidak dikenal daripada seorang pemikir baru yang mandiri. Barangkali karya Giddens selayaknya dipandang sebagai catatan akhir (*postscript*) bagi pelbagai kecenderungan utama pemikiran sosial di abad ke – 20.

Teori strukturisasi dalam studi ini digunakan sebagai pelengkap dari kajian-kajian struktur sosial yang sudah ada. Kronologis pembangunan masyarakat pesisir yang dimulai dari tahun 1970-an, diawali dengan pendekatan *product oriented*. Meskipun terjadi peningkatan produksi, namun berdampak pula pada konflik sosial secara meluas. Pendekatan rantai dingin, dan pendekatan kelembagaan ekonomi kemudian diterapkan setelah tahun 1980. Kemudian pemerintah meningkatkan produksi melalui tambak intensif. Ketika sepuluh tahun kemudian pendekatan parsial kurang berhasil, maka tahun 1990-an pemerintah menggunakan pendekatan agribisnis. Tahun 2003 mengenalkan program Protekan 2003. Setahun kemudian diganti dengan pendekatan holistik empat dimensi, dan terakhir tahun 2005, pemerintah menggulirkan program RPPK. Berbagai pendekatan pembangunan perikanan direspon oleh masyarakat secara beragam. Komponen pembangunan tidak selalu berintegrasi dengan struktur sosial.

1.2.6. Teori Struktural-Fungsional

Teori struktural-fungsional menggambarkan masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari struktur-struktur sosial yang saling terkait, di mana interaksi antar-bagian berlangsung teratur untuk mempertahankan stabilitas. Teori ini populer pada 1930-an hingga 1950-an di Inggris, khususnya dalam antropologi sosial, dengan tokoh utama seperti Radcliffe-Brown dan Malinowski. Radcliffe-Brown kemudian membawa teori ini ke Amerika melalui University of Chicago, dan Talcott Parsons memperluasnya di Harvard pada 1950-an, mengembangkan pendekatan yang lebih kompleks. Teori ini menekankan bahwa setiap bagian masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial, dengan konflik dianggap sebagai gangguan bagi stabilitas tersebut.

Sejak akhir 1960-an, teori struktural-fungsional mulai menerima banyak kritik yang tajam, memicu lahirnya teori-teori sosiologi baru yang lebih kompleks. Teori ini awalnya muncul sebagai respons terhadap dominasi teori evolusionisme, dengan fokus pada pembentukan sistem atau struktur sosial melalui pola hubungan antarindividu, kelompok, atau institusi dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari teori evolusi yang lebih menekankan perkembangan bertahap budaya manusia, mirip dengan tahap-tahap perkembangan organisme.

Pendekatan evolusionis bersifat diakronis dan historis, sedangkan teori struktural-fungsional lebih sinkronis dan statis (Marzali, 2005:128). Teori struktural-fungsional berakar dari fungsionalisme Durkheim, yang kemudian digabungkan dengan pendekatan struktural Radcliffe-Brown. Durkheim dianggap sebagai pionir pendekatan ini meskipun Spencer dan Comte sebelumnya telah menggunakan analisis fungsional dalam studi sosial. Durkheim menolak reduksionisme psikologis dalam memahami fenomena sosial, menekankan bahwa struktur sosial tempat seseorang berada sangat memengaruhi kehidupan mereka (Saifuddin, 2005:161-162).

Durkheim menegaskan perlunya dua pendekatan utama dalam menjelaskan fenomena sosial: pendekatan historis dan pendekatan fungsional. Analisis historis menjelaskan alasan historis di balik fungsi suatu elemen sosial dalam sistem sosial, sementara analisis fungsional menjelaskan mengapa elemen tersebut memiliki dampak tertentu terhadap keseluruhan operasi sistem sosial (Marzali, 2006:128). Selanjutnya, Marzali menguraikan:

“Para peneliti sosial, kata Durkheim, harus dapat mengombinasikan penelitian untuk mencari asal-usul dan sebab (pendekatan historis), di satu pihak, dan penentuan fungsi-fungsi dari suatu fenomena sosial (pendekatan fungsional), di pihak lain. Kita harus menentukan apakah ada satu hubungan antara kenyataan sosial yang diteliti dengan kebutuhan umum organisme sosial. Kalau ada, maka hubungan tersebut terdiri dari hal-hal apa saja, dan bagaimana prosesnya sehingga hubungan berfungsi tersebut terjadi.”

Émile Durkheim, sebagai salah satu tokoh utama dalam sosiologi klasik, menekankan pentingnya menggabungkan pendekatan historis dan fungsional dalam

menjelaskan fenomena sosial. Pendekatan historis bertujuan untuk menggali bagaimana suatu fenomena sosial berkembang dari waktu ke waktu dalam konteks budaya dan struktural tertentu. Sementara itu, pendekatan fungsional lebih berfokus pada bagaimana fenomena sosial tersebut berkontribusi terhadap keseimbangan dan keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan (Durkheim, 1895/1982).

Dua antropolog sosial yang dipengaruhi oleh pemikiran Durkheim dan mengembangkan pendekatan fungsional dalam studi masyarakat adalah Alfred Radcliffe-Brown dan Bronisław Malinowski. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya fungsi sosial dalam menjelaskan berbagai praktik dan institusi sosial, namun memiliki perspektif yang berbeda mengenai bagaimana fungsi itu harus dipahami. Radcliffe-Brown (1952) mengembangkan pendekatan struktural fungsionalisme, di mana ia melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berkaitan dan bekerja bersama untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam pandangan ini, setiap elemen sosial memiliki peran dalam mempertahankan struktur sosial, dan perubahan dalam satu bagian dapat mempengaruhi keseluruhan sistem.

Sebaliknya, Malinowski (1922) mengembangkan pendekatan fungsionalisme psikologis, yang lebih menekankan pada bagaimana elemen sosial memenuhi kebutuhan individu secara langsung. Baginya, semua praktik sosial harus dipahami berdasarkan manfaat konkret yang diberikan kepada individu, baik dalam aspek biologis maupun psikologis. Misalnya, ritual keagamaan tidak hanya berfungsi dalam menjaga solidaritas sosial, sebagaimana yang ditekankan oleh Durkheim dan Radcliffe-Brown, tetapi juga memiliki manfaat psikologis bagi individu yang mengalaminya, seperti memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan dalam menghadapi ketidakpastian hidup.

Perbedaan mendasar antara Radcliffe-Brown dan Malinowski mencerminkan adanya dua pendekatan utama dalam fungsionalisme. Radcliffe-Brown melihat fungsi sebagai sesuatu yang terkait dengan struktur sosial secara keseluruhan, sedangkan Malinowski melihat fungsi sebagai sesuatu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan individu (Kuper, 1996). Dalam perspektif struktural-fungsionalisme, setiap elemen sosial dianalisis berdasarkan bagaimana elemen tersebut membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem sosial yang lebih besar. Misalnya, dalam masyarakat nelayan, sistem kerja sama antar anggota komunitas tidak hanya berguna untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan, tetapi juga berperan dalam menjaga hubungan sosial dan memastikan distribusi sumber daya yang adil (Turner, 1974).

Sementara itu, dalam perspektif fungsionalisme psikologis, fenomena sosial dipahami dari sudut pandang kebutuhan individu. Sebagai contoh, dalam masyarakat nelayan tradisional, kepercayaan terhadap roh laut atau mitos tentang aturan penangkapan ikan dapat memberikan rasa aman bagi individu dalam menghadapi ketidakpastian alam. Kepercayaan ini tidak hanya berfungsi secara sosial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan membatasi eksploitasi sumber daya, tetapi juga

memberikan manfaat psikologis dengan mengurangi kecemasan yang muncul akibat risiko kerja di laut yang tinggi (Malinowski, 1944).

Baik pendekatan struktural-fungsionalisme maupun fungsionalisme psikologis telah memberikan kontribusi besar dalam memahami fenomena sosial. Radcliffe-Brown dengan pendekatan strukturalnya membantu menjelaskan bagaimana institusi sosial bertahan dalam jangka panjang dan bagaimana hubungan antarindividu membentuk struktur sosial yang lebih besar. Di sisi lain, Malinowski memberikan wawasan tentang bagaimana praktik budaya memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan mengapa praktik tersebut tetap bertahan dari generasi ke generasi.

Dalam perkembangan antropologi dan sosiologi modern, kedua pendekatan ini tetap relevan. Analisis struktural-fungsionalisme masih digunakan dalam studi tentang bagaimana sistem sosial bekerja, sementara pendekatan fungsionalisme psikologis sering digunakan dalam penelitian tentang budaya, ritual, dan adaptasi manusia terhadap lingkungannya (Giddens, 2006). Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana masyarakat berkembang dan bagaimana fenomena sosial berkontribusi terhadap kehidupan individu maupun sistem sosial secara keseluruhan.

Tabel 1 Struktur dan Fungsi

Unit	Sel-sel	Individu-individu manusia
Struktur	Hubungan antar sel	Hubungan antarmanusia
Kegiatan	Perilaku sel-sel yang nyata terlihat	Perilaku manusia yang nyata terlihat
Fungsi	Peran kegiatan-kegiatan dalam memelihara atau mempertahankan keselarasan antara dampak kegiatan tersebut dan kebutuhan dari struktur organisme biologis.	Peranan kegiatan-kegiatan dalam membina/menjaga struktur atau kesesuaian antara efek dari kegiatan dan kebutuhan dari struktur organisme biologis

Tabel di atas menunjukkan bahwa teori struktural-fungsional memahami fenomena sosial dengan model organisme biologis, mencerminkan prinsip-prinsip positivisme dari Comte, Spencer, dan Durkheim. Dalam pandangan ini, masyarakat adalah struktur sosial yang terdiri dari jaringan hubungan sosial kompleks di antara anggota-anggotanya. Hubungan antaranggota bukanlah interaksi individu belaka, melainkan bagian dari jaringan sosial yang lebih luas yang membentuk struktur sosial (Marzali, 2006:130).

Teori ini memandang kehidupan sosial sebagai rangkaian hubungan fungsional yang membentuk struktur sosial dan menjaga sistem sosial masyarakat. Pranata atau upacara sosial dianggap penting untuk mempertahankan struktur sosial dan memastikan stabilitas sistem.

Struktural-fungsionalisme adalah salah satu pendekatan utama dalam sosiologi yang berupaya menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan pranata sosial dalam menjaga keteraturan masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang mendukung keseimbangan sosial. Struktural-fungsionalisme berakar pada pemikiran Émile Durkheim dan Herbert Spencer, tetapi berkembang lebih lanjut melalui kontribusi Vilfredo Pareto, Talcott Parsons, dan Robert K. Merton (Ritzer, 2011).

Vilfredo Pareto memberikan pengaruh signifikan terhadap teori struktural-fungsionalisme, terutama dalam gagasannya tentang masyarakat sebagai sistem yang saling terkait dan berusaha mencapai keseimbangan. Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang berfungsi seperti sistem organisme, di mana perubahan dalam satu bagian akan memengaruhi bagian lainnya. Ia mengembangkan konsep sirkulasi elite, yang menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat selalu terjadi pergantian kekuasaan antara kelompok elite lama dan baru untuk menjaga stabilitas sosial (Pareto, 1916/1935). Pemikirannya ini kemudian menjadi dasar bagi teori struktural-fungsional yang dikembangkan oleh sosiolog

setelahnya, terutama dalam melihat bagaimana sistem sosial dapat tetap stabil meskipun mengalami perubahan.

Talcott Parsons (1951) merupakan salah satu tokoh utama dalam mengembangkan teori struktural-fungsionalisme dalam sosiologi modern. Ia berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari beberapa subsistem yang saling bergantung untuk menciptakan stabilitas. Parsons merumuskan model AGIL (Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency), yang menjelaskan bahwa agar masyarakat dapat bertahan, ia harus:

1. Adaptasi (A) – menyesuaikan diri dengan lingkungan, baik dalam aspek ekonomi maupun ekologi.
2. Pencapaian Tujuan (G) – menentukan tujuan kolektif dan mencapainya melalui sistem politik.
3. Integrasi (I) – menjaga hubungan harmonis antara berbagai elemen masyarakat agar tidak terjadi disintegrasi sosial.
4. Latensi/Pemeliharaan Pola (L) – mempertahankan nilai-nilai dan norma melalui lembaga sosial seperti keluarga dan pendidikan (Parsons, 1951).

Menurut Parsons, keseimbangan sosial dapat dicapai melalui hubungan antara sistem sosial, sistem budaya, dan kepribadian individu. Sistem sosial mencakup struktur masyarakat dan interaksi sosialnya, sistem budaya mencakup nilai-nilai dan norma yang membentuk perilaku individu, sedangkan sistem kepribadian berkaitan dengan bagaimana individu beradaptasi dengan norma sosial yang ada (Ritzer, 2011:280-281).

Robert K. Merton (1949) mengembangkan dan mengkritik struktural-fungsionalisme klasik dengan memperkenalkan konsep fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah konsekuensi yang disadari dan diinginkan dari suatu tindakan sosial, sedangkan fungsi laten adalah konsekuensi yang tidak disadari atau tidak dimaksudkan tetapi tetap berpengaruh terhadap masyarakat. Sebagai contoh, pendidikan memiliki fungsi manifes untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga memiliki fungsi laten dalam membentuk stratifikasi sosial berdasarkan latar belakang ekonomi siswa (Merton, 1949).

Merton juga menolak gagasan bahwa semua elemen sosial selalu berfungsi untuk stabilitas masyarakat. Ia memperkenalkan konsep disfungsi sosial, yaitu kondisi di mana suatu elemen justru dapat mengganggu keseimbangan sistem sosial. Misalnya, birokrasi yang terlalu kaku dapat menghambat efisiensi organisasi, sehingga bertentangan dengan tujuan awalnya untuk meningkatkan efektivitas kerja (Merton, 1968).

Meskipun mendapat kritik dari berbagai perspektif, termasuk teori konflik dan interaksionisme simbolik, struktural-fungsionalisme tetap menjadi pendekatan penting dalam memahami masyarakat modern. Teori ini digunakan dalam berbagai studi sosial, seperti analisis kelembagaan, perubahan sosial, dan struktur ekonomi-politik. Dalam studi masyarakat nelayan, misalnya, pendekatan ini dapat digunakan

untuk menjelaskan bagaimana pranata sosial, seperti sistem pembagian kerja antara nelayan dan pedagang ikan, berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi komunitas pesisir. Selain itu, sistem norma dan nilai budaya dalam komunitas nelayan dapat dipahami sebagai mekanisme integrasi sosial yang membantu menjaga keseimbangan dalam menghadapi perubahan lingkungan dan ekonomi (Turner, 1974).

Dalam era globalisasi, struktural-fungsionalisme juga diterapkan dalam kajian tentang dampak teknologi dan perubahan ekonomi terhadap struktur sosial. Misalnya, masuknya teknologi modern dalam dunia perikanan telah mengubah dinamika sosial antara nelayan tradisional dan industri perikanan besar, yang berpotensi menciptakan ketidakseimbangan sosial (Giddens, 2006).

Struktural-fungsionalisme menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat berfungsi sebagai sistem yang saling berhubungan. Konsep keseimbangan sosial dari Pareto, model sistem sosial dari Parsons, serta pengembangan kritis dari Merton membantu menjelaskan bagaimana berbagai elemen sosial berkontribusi terhadap stabilitas masyarakat. Meskipun teori ini menghadapi kritik, relevansinya dalam memahami struktur sosial dan perubahan sosial tetap kuat, terutama dalam studi tentang institusi sosial, norma budaya, dan dinamika ekonomi-politik dalam berbagai masyarakat.

Pada kehidupan sosial manusia, masyarakat adalah struktur karena komponennya saling berhubungan dan membentuk jaringan yang kompleks. Individu yang menjadi bagian dari struktur sosial dianggap sebagai individu yang menduduki posisi atau status di dalam struktur sosial tersebut. Struktur sosial tersebut memiliki bentuk yang tetap dan isi yang statis karena merupakan bagian non-prosedural (tidak menyesuaikan) dari sistem sosial yang bersangkutan, dan proses perubahannya berjalan agak lambat. Namun, wujud struktur sosial tersebut selalu berubah dan berubah karena di dalam struktur sosial yang bersangkutan terdapat ruang untuk perubahan.

Status sosial berubah, yang menyebabkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Status sosial seseorang didefinisikan sebagai tempatnya secara umum dalam masyarakat, termasuk lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak dan kewajibannya (Soekanto, 2015).

Menurut Pitirim A. Sorokin, sistem pelapisan masyarakat mencakup karakteristik yang konsisten dan umum dalam setiap masyarakat yang teratur. Mereka memiliki barang yang sangat berharga dalam jumlah besar, dan mereka yang memiliki barang yang sangat sedikit atau sama sekali tidak memilikinya berada di lapisan bawah. Oleh karena itu, perubahan status sosial menjadi subjek yang menarik untuk studi antropologi, terutama yang berkaitan dengan masyarakat Desa Tolokibit di Kabupaten Banggai Laut.

1.3. Masalah Penelitian

Penelitian ini merangkum dan mengkaji cara masyarakat Desa Tolokibit, Banggai, menafsirkan pengalaman masa lalu di tengah perubahan status sosial yang cepat. Melalui etnografi ini, saya berupaya memberi kesempatan kepada mereka

untuk merefleksikan pencitraan masa lalu dan perubahan sosial budaya masa kini. Ini adalah etnografi tentang masyarakat yang mengalami dinamika status sosial dalam kehidupan sehari-hari di Banggai Laut.

Oleh karena itu, masalah penelitian ini, akan dibagi dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengembangan dinamika sosial ekonomi masyarakat pesisir di Desa Tolokibit, Kabupaten Banggai Laut?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi terjadinya dinamika sosial ekonomi di Desa Tolokibit, Kabupaten Banggai Laut?
3. Dampak apa yang ditimbulkan oleh adanya dinamika sosial ekonomi di Desa Tolokibit, Kabupaten Banggai Laut?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sosial budaya berkenaan dengan status sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di Desa Tolokibit Kabupaten Banggai Laut. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis proses pengembangan dinamika sosial ekonomi masyarakat di Desa Tolokibit, Kabupaten Banggai Laut;
- 2) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya dinamika sosial ekonomi di Desa Tolokibit, Kabupaten Banggai Laut.
- 3) Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh dinamika sosial ekonomi masyarakat di Desa Tolokibit, Kabupaten Banggai Laut;

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan kemajuan masyarakat, antara lain:

- 1) Secara akademis, penelitian memberikan kesempatan untuk menggali dan memahami masalah terkait status sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian, penemuan baru dapat dilakukan, serta pengetahuan dapat diperluas, terutama dalam bidang ilmu antropologi.
- 2) Secara praktis, penelitian dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Dengan adanya penelitian, berbagai bukti yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat di berbagai sektor, termasuk dalam pembangunan sosial.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, berupa pendeskripsian dinamika sosial ekonomi masyarakat di Desa Tolokibit, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Tolokibit, yang secara administratif berada di Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Penelitian dilaksanakan pada 13 Juli – 13 Oktober 2024. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa daerah ini masyarakatnya telah mengalami perubahan status sosial dalam kurun waktu tertentu hingga saat ini. Secara metodologi alasan memilih lokasi penelitian ini karena masyarakat di lokasi penelitian ini memiliki dinamika sosial ekonomi yang unik dibandingkan desa lain di Kabupaten Banggai Laut.

2.3. Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri dari tokoh adat Banggai, tokoh adat, tokoh agama dan aparat keamanan serta pihak-pihak yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lokasi penelitian. Daftar informan penelitian ini adalah:

Tabel 2 Daftar Nama Informan

No.	Nama	Umur (tahun)	Pekerjaan
1.	Mansyur	50	Aparat desa
2.	Rahman	36	Petani kelapa
3.	Hendra	45	Petani cengkeh
4.	Bahtiar	52	Petani cengkeh
5.	Rahim	38	Petani cengkeh/kelapa
6.	Armi	51	Ibu rumah tangga/istri petani
7.	Jusman	60	Petani/nelayan
8.	Ummu	43	Ibu rumah tangga/istri petani/nelayan

Sumber: Data Primer, 2024

2.4. Sumber Data

- 1) Data Primer, berupa data yang objek yang akan diteliti, yaitu informan dan keadaan di lokasi penelitian.
- 2) Data sekunder adalah data dari lembaga atau institusi tertentu, seperti instansi pemerintahan, swasta, dan organisasi masyarakat yang umumnya terkait data-data kuantitas atau dokumen-dokumen dari instansi terkait.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pedoman wawancara yang mencakup topik tentang kelembagaan, fungsi, dan partisipasi masyarakat. Wawancara direkam, kemudian ditranskrip dan dianalisis. Catatan lapangan juga dibuat sebagai laporan yang mencatat pengalaman dan refleksi selama penelitian.

2.6. Analisis Data

Tahap analisis data sebagai berikut: *Pertama*, merapikan data-data penelitian baik yang berupa transkrip wawancara, dokumentasi foto atau video, dan catatan-catatan kecil dari hasil observasi di lapangan; *Kedua*, melakukan *coding data* secara keseluruhan terhadap data dasar yang telah diperoleh di lapangan; *Ketiga*, melakukan analisis data dari hasil *coding data* yang telah dilakukan sebelumnya; *Keempat*, hasil analisis dibuatkan tema berdasarkan pertanyaan penelitian yang hendak di jawab; dan *Kelima*, menulis laporan penelitian secara deskriptif, naratif, dan holistik.

2.7. Etika Penelitian

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti mengurus izin secara formal dari kampus kepada Pemda Banggai Laut, Sulawesi Tengah, serta kepada informan penelitian ini. Selama penelitian, saya menjelaskan kepada semua informan mengenai tujuan penelitian dan meminta izin untuk merekam serta mencantumkan nama lengkap dan usaha mereka secara jelas. Semua informan setuju untuk direkam melalui aplikasi di ponsel. Saya juga memastikan bahwa informasi bersifat rahasia atau "off the record" tidak akan dicantumkan dalam penelitian. Seluruh informan bersedia berpartisipasi sebagai informan, termasuk pengungkapan identitas mereka, seperti nama, usia, dan pekerjaan.